PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN

(Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)

Mukhamad Hendra Kurniawan

S1 Ilmu Administrasi Negara , FIS, UNESA (hendz_awan@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik). Pentingnya keikutsertaan dan bentuk partisipasi dari masyarakat yang di berikan merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah.Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat agar akses masyarakat dalam beraktifitas bisa lebih mudah yang mulanya jalan tidak layak untuk dilewati saat musim hujan oleh karena itu di harapkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Kampung Baru dan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Nganjuk. Informan Penelitian ini adalah Sekretaris Dinas PU Cipta Karya, Sekretaris Desa, Pengurus Pembangunan, Kepala Dusun dan Warga Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, interview guide, field note, dan perangkat penunjang. Analisis data menggunakan teori Milles dan Huberman (2009:20) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, kemanfaatan dan evaluasi sudah baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PPIP masih kurang baik, sehingga pembangunan pavingisasi mengalami keterlambatan 1 bulan

Saran yang diberikan dalam penelitan ini adalah Agar program juga terlaksana dan terkoordinir dengan baik , sebagai tim pelaksana harus membina hubungan yang baik dengan masyarakat agar nantinya, masyarakat mendukung sepenuhnya dalam kelancaran pembangunan jalan paving.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan

ABSTRACT

Community participation in any process of making public policy is important as the mirror principle of democracy in a country. This has to be very precise when public participation was subsequently appointed one of the principles that should be run by the Government in its efforts to achieve good governance (good Governence). The importance of participation and the participation of the community in supporting the success of the program is to give a given by the Government. Road infrastructure development programme in the village of Kampung Baru Sub-district Tanjunganom Nganjuk aimed at the welfare of society in order to access the community in activities can more easily which was originally the road unfit to impassable rainy season therefore expect the participation of the community to resolve the existing problems in his village.

This research is descriptive research approach to a qualitative approach is used. The research was conducted in the village of Kampung Baru and Office of PU Cipta Karya Nganjuk. This Research is the informant's Secretary Office of Copyright Works, Secretary PU village, Board development, Head of the village and villagers. Data collection techniques used are interviews and documentation. Research instrument used is the researchers themselves, the interview guide, field note, and ancillary devices. Data analysis using the theory of Milles and Huberman (2009: 20): data collection, data presentation, data reduction and data tethering.

The research results showed that public participation in the planning stages, and the evaluation of expediency has been good. Community participation in PPIP program execution is still not good, so the construction of the pavingisasi experienced a delay of 1 month.

The advice given in this study was That the program was also carried out and terkoordinir well, as implementing team must build a good relationship with the community so that the community supports the later, fully in the smooth road construction paving.

Keywords: public participation and development

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik). Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan good governance yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembanguan yang ada di dalamnya (owner).

Pembangunan desa mempunyai makna membangun masyarakat perdesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006:4). Pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatankegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan diartikan sebagai aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau provek di masyarakat (Adisasmita, 2006:34).

Salah satu tujuan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahannya dan penyediaan infrastruktur perdesaan. Dari 3 sasaran utama kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) adalah : 1) Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. 2) Meningkatnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan dan 3) Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (Buku pedoman PPIP 2013)

Pencapaian sasaran yang pertama memerlukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penentuan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Untuk mencapai sasaran yang kedua dimana kegiatan tersebut dilakukan demi meningkatnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur, maka diperlukan partisipasi masyarakat yang tinggi untuk dapat mewujudkannya kondisi kemampuan masyarakat yang

diharapkan. Sedangkan sasaran ketiga yaitu terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sangat jelas mencantumkan bahwa partisipasi merupakan point sasaran utama.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 2013 merupakan bagian dari PNPM. dialokasikan untuk 32 Provinsi di seluruh Indonesia. Seluruh desa tersebut ialah usulan dari masyarakat dan yang belum mendapatkan Program pemerintah Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak di bidang infrastruktur perdesaan (PKPS-BBM IP). Program ini menekankan partisipasi masyarakat dalam proses kegiatannya. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2013, dititik penanganannya pada desa tertinggal yang memiliki pelayanan infrastruktur yang rendah. Fokus utama program ini adalah: (i) pengembangan masyarakat (ii) pembangunan/peningkatan infrastruktur perdesaan dan (iii) peningkatan peran stakeholder dan pemerintah daerah, Salah satu daerah yang mendapatkan program ini adalah Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dilaksanakan sejak 7 Oktober 2013 yang lalu, tujuan dari pembangunan jalan desa ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat agar akses masyarakat dalam beraktifitas bisa lebih mudah oleh karena itu di harapkan peran serta masyarakat. Perlunya bentuk partisipasi yang di berikan masyarakat sangat memberi pengaruh terhadap kelancaran program PPIP. Dalam hal ini kontribusi dalam bentuk apapun akan di terima, sehingga masyarakat akan merasa lebih bertanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan dengan baik.

Program ini di targetkan akan selesai pada 31 Desember 2013. Untuk mempermudah proses jalannya pembangunan tersebut PPIP Pusat memberikan alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,00 yang dibagi untuk fisik sebesar Rp. 245.000.000,00 dan untuk BOP sebesar Rp. 5.000.000,00. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bila masyarakat berkontribusi dalam bentuk apapun, misalnya tenaga, uang, dan material/bahan program ini tidak memberi paksaan untuk masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat timbul dari dalam hati masyarakat itu sendiri.

Partisipasi dapat berjalan lancar bila masyarakat memberikan kontribusi dalam proses kegiatan. Melalui berbagai macam bentuk pasrtisipasi inilah masyarakat bisa ikut terlibat dan dapat bertanggung jawab atas program yang di berikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakan dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PPIP di Desa Kampung Baru masih kurang baik yang ditunjukan dengan adanya masalah kehabisan bahan material vang kurang diantisipasi dengan baik. Hal ini menuniukan proses pengawasan pelaksanaan pembambangunan melalui partisipasi masyarakat adalah kurang.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut

untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam judul : "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan studi kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ". Dengan tujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru dalam pembangunan infrastruktur jalan paving desa pada program kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjuganom Kabupaten Nganjuk.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Canter (Arimbi, 1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.

Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi tertentu masyarakat terlibat dalam kondisi mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

B. Jenis Partisipasi Masyarakat

Iskandar dalam Huraerah (2004:116) memperinci jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:

- 1. Partisipasi buah pikiran
- 2. Partisipasi tenaga
- 3. Partisipasi harta benda

- 4. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran
- 5. Partisipasi sosial

Huraerah (2008:117) membagi pertisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

- 1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- 2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- 3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- 4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 5. Partisipasi respresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988:16), jenis-jenis partsipasi meliputi:

- a. Pikiran
- b. Tenaga.
- c. Pikiran dan tenaga
- d. Keahlian
- e. Barang dan Uang.

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011:25) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai participation of decision making, participation in implementation, participation in benefit dan participation in evaluation. Bentuk partisipasi yang dikemukan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat.

1. Participation in decision making

Participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan.

Pengukuran terhadap ada atau tidaknya partisipasi di masyarakat harus melihat peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Membahas masalah, mencari alternatif pemecah masalah dan membahas keputusan.

2. Participation in implementation

Participation in implementation partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berwujud kontribusi. Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011:34) mengemukakan bahwa partisipasi pembangunan melalui dapat dilakukan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang dapat berwujud sebagai berikut:

a. Kontribusi dengan tenaga.

- b. Kontribusi dengan uang.
- c. Kontribusi dengan bahan (material).

3. Partisipation in benefit

Partisipation in benefit atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat.

- a. Mengikuti kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan
- b. Mengikuti kegiatan keagamaan
- Mengikuti kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan
- Mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi pertahanan daerah dan untuk meningkatkan perekonomian.

4. Partisipation in evaluation

Partisipation in evaluation atau keikutsertaan evaluasi merupakan keikutsertaan dalam masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik tehadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Sebagaimana Cohen dan Uphoff (1977:56-57) yang mengatakan bahwa masyarakat terhadap penyelenggaraan terlibat pembangunan desa, baik yang ditentukan oleh lembaga formal maupun informal, secara langsung maupun tidak langsung dari segenap aktivitas politik maupun publik opinion. Suwignjo (1985:110) partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

D. Konsep Pembangunan

Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000:21), definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

- 1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan.
- 2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
 - a) Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- b) Self-Esteem: Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak "diisap" orang lain.
- c) Freedom From Survitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi popular (Todaro, 2000:24), yaitu:

- 1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.
- 2. Equity, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
- 3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
- 4. Suistanable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

E. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur.

PPIP bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPIP adalah:

- 1. Dapat diterima (Acceptable), pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas (acceptable). Prinsip ini berlaku dari sejak pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur, penentuan spesifikasi teknis, penentuan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pada penetapan mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaannya.
- Transparansi, penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparent). Transparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi terkait program secaraakurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
- 3. Akuntabel, penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan (accountable), dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan.
 - 4. Berkelanjutan, penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable) yang ditandai dengan adanya rencana pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur terbangun secara mandiri oleh masyarakat. (Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau juga peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat

sekedar untuk mengungkapkan fakta. Menurut Nazir (1988:63) Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan menurut Surakhmad (1987:131) metode deskriptif adalah untuk memecahkan masalah yang aktual, dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterprestasikannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata atau tulisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Data sebagai bukti dalam menguji kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis tidak diolah melalui perhitungan matematik dengan berbagai rumus statistik. Pengolahan data dilakukan secara rasional denagn menggunakan pola berfikir tertentu menurut logika.

Kesimpulan yang diambil tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian sistematis , faktual, akurat dan jelas serta bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala lainnya di masyarakat. Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang diidentifikasikan diatas didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti dokumen ataupun laporan-laporan yang terkait baik kalimat atau kata maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk kata-kata.

Sumber data yang digunakan dalam proses pengumpulan data di lapangan peneliti berusaha memperoleh data yang sebenarnya dari nara sumber yang tepat dan dapat menjadi pegangan akan keakuratan dari hasil peneliti nantinya. Dengan demikian dalam penelitian ini akan dikelompokan berdasarkan cara memperolehnya yaitu :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti. Data tersebut menjadi data sekunder jika digunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung peneliti yang bersangkutan. Data primer diperoleh dari wawancara berada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Nganjuk yaitu Dinas PU Cipta Karya, Kantor Desa dan Masyarakat.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dilapangan penelitian atau dalam arti lain diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti yaitu melalui dokumen, arsip, laporan, catatan, dan lain-lain yang banyak memuat informasi ataupun data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Dinas PU Cipta Karya (Sekretaris Dinas)
- 2. Pemerintah Desa (Sekretaris Desa)

- 3. Pengurus Pembangunan (Ketua OMS dan Fasilitator)
- 4. Kepala Dusun.
- Warga Desa (Darso, Hartoyo, Sugeng dan Tomah)

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data adalah Wawancara atau interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula, dan dokumentasi cara untuk menelaah dokumen-dokumen laporan hasil pelaksanaan tanggung Jawab masing-masing aparat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peneliti sendiri. (interview guide), (field note), dan perangkat penunjang

Analisis data peneliti ini memakai Miles dan Huberman (2009:20) adalah Pengumpulan data (data collection) dari wawancara, observasi dan dokumentasi, Reduksi data (data reduction) proses pemilihan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Kampung Baru merupakan salah satu dari 16 desa yang ada dalam wilayah adminitrative Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang mempunyai luas 722,66 ha dan merupakan daerah dataran rendah. Mata pencaharian Desa Kampung Baru dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan dll. Desa Kampung Baru angka pengangguran masih cukup rendah karena ada beberapa penduduk yang memiliki usaha industri rumah daur ulang kayu-kayu menjadi perabotan rumah tangga seperti meja, almari dll, yang dipasarkan sendiri dengan menggunakan sepeda ataupun motor.

Jumlah penduduk Desa Kampung Baru tahun 2014, jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK) terdiri dari 3355 KK, dengan jumlah 12.248 jiwa, dengan rincian 7083 jiwa jenis kelamin laki-laki dan 5165 jiwa jenis kelamin perempuan. Usulan kegiatan pembangunan jalan paying desa berasal dari usulan campuran yaitu dari keompok perempuan dan kelompok laki-laki.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan atau yang lebih dikenal sebagai PPIP bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan tertinggalan yang ada didesanya.

PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat dibawah payung PPIP Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitas dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan askes keinfrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar.

Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur perdesaan tidak selalu muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan itu, maka pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu saja. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan perdesaan sangat penting guna memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang sedang mereka butuhkan supaya pembangunan yang dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang terkait erat dan berpengaruh dengan pelaksanaan pembangunan jalan paving. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan paving dapat berjalan dengan lancar karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru dalam pembangunan jalan paving dapat uraikan sebagai berikut:

a. Participation in decision making.

Participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan.

Semua kegiatan PPIP dilakukan melalui Musyawarah Desa. Terdapat empat musyawarah desa yaitu Mudes I membahas tentang tujuan, prinsip, dan pendekatan program, penjelasan struktur organisasi program, dan membentuk kepengurusan OMS, KPP, dan Kader Desa. Mudes II membahas tentang prioritas permasalahan yang terdapat didesa, prioritas kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan PJM pronangkis, Ketersediaan lahan/hibah lahan, pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun, perumusan rencana kegiatan untuk penyusunan RKM. Mudes III membahas tentang penetapan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemilihan dan penetapan panitia pengadaan barang/jasa, dan penetapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Mudes IV membahas tentang hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pengolaan dana bantuan oleh OMS, Laporan pertanggung jawaban, mencakup : laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K), Realisasi kegiatan dan biaya (RKB) disertai dengan foto-foto pelaksanaan. Musyawarah desa tahap perencanaan sampai tahap evaluasi dilakukan oleh Ketua OMS.

b. Participation in implementation.

Participation in implementation atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berwujud kontribusi. Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011:34) mengemukakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang dapat berwujud sebagai berikut:

- a. Kontribusi dengan tenaga.
- b. Kontribusi dengan uang.
- c. Kontribusi dengan bahan (material).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan sumbangan yang diberikan masyarakat berdasarkan kemauan dan kemampuan

masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa memiliki program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program PIPP. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, uang, maupun bahan(material) pada saat pelaksanaan kegiatan. PPIP tidak membatasi bentuk-bentuk partisipasi, lebih memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan tenaga dan dalam bentuk sumbangan makanan itu juga lebih bagus. Namun ketentuan dari PPIP tidak memilih adanya sumbangan material secara langsung karena program ini menginginkan kualitas bahan yang baik dan tidak mudah rusak untuk jangka yang lebih lama.

PPIP menginginkan jenis material dengan kualitas yang bagus agar hasil pembangunan jalan paving desa tidak mudah rusak. Jika masyarakat menginginkan memberi sumbangan, maka diharapkan sumbangan yang diberikan dalam bentuk Tenaga. Karena sumbangan dalam bentuk uang tidak terlalu dibutuhkan oleh Desa Kampung Baru jadi swadaya masyarakat dalam bentuk sukarela dari masyarakat yang Rp.3.000.000,00 pada saat Mudes Penetapan usulan. Besaran dana yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan paving desa ini sebesar Rp. 250. 000.000,00 yang Rp. 245.000.000,00 untuk pembangunan 5.000.000,00 untuk BOP. Dana tersebut diperoleh dari PPIP pusat dan berasal dari sumbangan masyarakat (sumber: Buku LP2K Desa Kampung Baru).

Sumbangan dalam bentuk tenaga sangat diharapkan oleh PPIP, tetapi sumbangan tenaga yang diberikan masyarakat Desa Kampung Baru pada saat pelaksanaan pembangunan jalan paving desa berlangsung diberi imbalan berupa upah Hari Ongkos Kerja (HOK) supaya mereka mendapatkan pendapatan dari kegiatan pembangunan jalan paving desa.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga sangat diharapkan. Pembangunan jalan paving desa ini juga memberi lapangan pekerjaan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan bekerja sebagai tenaga kerja pada pembangunan jalan paving desa. Upah Hari Ongkos Kerja (HOK) bagi tenaga kerja tidak dikenakan potongan atau diminta sebagai bentuk sumbangan masyarakat. Karena upah Hari Ongkos Kerja (HOK) ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Kampung Baru.

Masyarakat Desa Kampung Baru terutama bagi Rumah Tangga Miskin sangat diuntungkan dengan adanya proyek pembangunan jalan paving desa ini. Para Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada di Desa Kampung Baru bisa bekerja sebagai kuli bangunan untuk menambah pendapatan dan mampu mengatasi permasalah perekonomian mereka sehari-hari. Upah Harian Pekerja untuk tukang (tenaga ahli) sebesar Rp.42.500,00 perhari, sedangakan upah Harian Kerja untuk kuli bangunan sebesar Rp. 35.000,00 perhari. Hari kerja yang ditentukan yaitu hari senin sampai hari sabtu. Dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. (Sumber: Buku LP2K Desa Kampung Baru)

Sumbangan dalam bentuk pemberian makanan dilakukan karena adanya nilai gotong royong yang masih tinggi di masyarakat Desa Kampung Baru. Sehingga

pembangunan jalan paving desa di Desa Kampung Baru dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan sumbangan secara swadaya dalam bentuk pemberian konsumsi berupa makanan dan minuman untuk para pekerja yang bekerja dalam kegiatan pembangunan jalan paving desa.

c. Partisipation in benefit

Partisipation in benefit atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat.

- 1. Mengikuti kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan
- 2. Mengikuti kegiatan keagamaan
- 3. Mengikuti kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan
- Mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi pertahanan daerah dan untuk meningkatkan perekonomian.

Kegiatan pembangunan jalan paving desa ini telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Kampung Baru. Hal tersebut berdasarkan dari perencanaan awal yaitu agar jalan desa tidak mudah rusak, dan dapat di gunakan oleh masyarakat Desa Kampung Baru dalam jangka panjang. Selain untuk memberikan fasilitas desa kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif dari masyarakat agar selalu tercipta rasa gotong royong serta membangun kepedulian antar sesama.

Hasil dari gotong royong dari masyarakat untuk pembangunan jalan paving desa di Desa Kampung Baru juga dimanfaatkan untuk para warga yang terlibat dalam pembangunan jalan paving dan manfaat dari gotong royong tersebut nantinya juga akan memperkuat rasa kepedulian terhadap sesama. Selain itu hasil dari pembangunan jalan paving desa ini juga dapat bermanfaat bagi semua warga Desa Kampung Baru bahkan pihak dari luar Desa Kampung Baru yang menggunakan akses jalan Desa Kampung Baru yang telah di bangun jalan paving desa karena tanah jalan yang sebelum dibangun tidak layak dilewati sehingga warga sendiri dalam beraktifitas jadi malas dan terhambat.

Pembangungan jalan paving desa juga telah memberikan manfaat kepada masyarakat, imbal balik yang di harapkan dari pihak PPIP adalah supaya masyarakat dapat memanfaatkannya dan menjaga agar tidak mudah rusak, dengan kata lain bahwa masyarakat harus bida menjaga dan memafaatkan jalan paving yang sudah di buat dengan sebaik – baiknya.

pemeliharaan yang dilakukan masyarakat Desa Kampung Baru sudah baik. Tanpa diadakannya kerja bakti, masyarakat Desa Kampung Baru sudah mempunyai kesadaran diri untuk memelihara jalan paving desa supaya tidak cepat rusak dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kampung Baru dalam jangka panjang.

d. Partisipation in evaluation

Partisipation in evaluation atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan

kritik tehadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Sebagaimana Cohen dan Uphoff (1977: 56-57) yang mengatakan bahwa masyarakat harus terlibat terhadap penyelenggaraan pembangunan desa, baik yang ditentukan oleh lembaga formal maupun informal, secara langsung maupun tidak langsung dari segenap aktivitas politik maupun publik opinion. Suwignjo (1985:110) partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberhasilan pembangunan jalan paving desa dapat dilihat dari tahap evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan keadaan yang nyata dan keadaan yang diharapkan dalam tujuan pembangunan jalan paving desa serta Kesesuaian antara perencanaan dan hasil dari pembangunan. Dengan adanya evaluasi dapat diketahui kekurangan dan permasalahan dari pelaksanaan pembangunan jalan paving desa dan mencari solusi jika terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan paving desa.

Tahap evaluasi sudah dilakukan melalui rapat yang diadakan di Balai Desa Kampung Baru dan peninjauan kembali daerah yang sudah Dilakuka pembangunan paving desa. Partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam rapat yang diadakan di balai Desa Kampung Baru. Rapat diadakan setelah pembangunan jalan paving desa selesai dilaksanakan. Dalam rapat yang diadakan dinyatakan bahwa pembangunan jalan paving desa tersebut sudah sesuai dengan prosedur, sasaran, dan tujuan pembangunan jalan paving desa. Pembangunan jalan paving desa diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan lebih. Hasil dari pembangunan lebih bagus dari perencanaan awal.

Hasil dari pembangunan paving desa menjadi lebih baik dan berkualitas di karenakan waktu yang molor, sehingga tim PPIP sendiri lebih teliti dalam proses pembangunannya. Molornya pembangunan paving desa ini dapat di ketahui dari banyaknya pemesanan tender sehingga tender dari jombang tersebut mengalami antrian.

Pembangunan jalan paving Desa Kampung Baru walaupun tidak sesuai dengan perencanaan awal yang mulanya diperkirakan 1 bulan selesai akan tetapi belum selesai namun tidak mengurangi dan membebani masyarakat sehingga tetap berjalan lancar. Keseluruhan evaluasi yang dilaksanakan melalui rapat dibalai Desa Kampung Baru menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan jalan paving desa mencapai 100%. Namun kehadiran masyarakat dalam rapat evaluasi hanya sedikit. Hanya dihadiri oleh pemerintah Desa Kampung Baru, Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Teknik dan masyarakat Desa Kampung Baru hanya sedikit. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dikatakan relatif baik.

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan juga dapat dilihat dari permasalahan yang muncul ketika pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan paving desa dilaksanakan, akan tetapi permasalahan yang muncul adalah sempat terhentinya kegiatan paving desa untuk sementara waktu di karenakan telatnya pengiriman bahan bangunan saat bahan stok paving desa habis. Dari pihak masyarakat sendiri partisipasinya juga cukup baik, hanya beberapa warga yang tidak ikut serta dalam pembangunan di karenakan ada kepentingan sendiri seperti PNS, atau wiraswasta yang tidak bisa di tinggalkan, akan tetapi mereka ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan seperti makanan dan lain-lain. Pemantauan kegiatan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh tim fasilitator saja tetapi juga dilakukan oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan paving desa tidak terdapat permasalahan secara umum yang muncul, baik itu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan maupun perilaku pemerintah Desa Kampung Baru dalam mengelolah kegiatan pembangunan jalan paving desa hanya saja permasalahan yang muncul dari pengiriman tender yang tidak sesuai dengan waktu yang di telah di sepakati.

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang sudah di lakukan dan di uraikan, bahwa partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru dalam pembangunan jalan paving sesuai dengan tahap yaitu mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini seperti yang diungkapkan menurut Cohen dan uphoff dalam mulyadi (2011:25) yaitu memberikan rumusan partipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai participation of decision making, participation in implementation, participation in benefit dan participation in evaluation. Maka dalam pembahasan ini akan dideskripsikan partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru dalam pembangunan jalan paving dilihat dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi pelaksanaan kegiatan, partisipasi pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi.

Berhasil atau tidaknya suatu program yang telah di rencanakan oleh PPIP demi memberikan manfaat bagi masyarakat adalah tergantung juga dari keterlibatan masyarakat itu sendiri dan dari kelancaran sarana prasarana yang mendukung. Hal ini juga diungkapkan menurut Sanit (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat untuk mencapai keberhasilan. Dari hasil pembangunan tidak sesuainya deadline yang di harapkan dari perencanaan itu bukan satu-satunya penghalang dari berhasilnya program itu namun kerterlibatan masyarakat dan antusiasme serta pola pikir masyarakat sendiri keseimbangan sehingga terjadi dan keselarasan. merupakan fasilitator Pemerintah dan masyarakat nantinya yang akan bertanggung jawab untuk menjaga dan menggunakan sebagaimana semestinya.

Pemerintah Desa Kampung Baru berupaya melibatkan semua masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dengan pembangunan mengadakan musyawarah desa supaya masyarakat dapat menyampaikan usulan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Kampung Baru. Tidak hanya partisipasi dalam perencanaan saja, namun juga partisipasi dalam tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan hasil, dan tahap evaluasi. Tetapi masyarakat Desa Kampung Baru memiliki partisipasi yang cukup antusias dalam pembangunan jalan paving desa. Partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru harus terus ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat Desa Kampung Baru sendiri. Partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru dalam Pembangunan jalan paving desa dijelaskan sebagai berikut:

1. Participation in decision making

UNAPDI (1980:83-84) Pada umumnya, setiap pembangunan masyarakat (termasuk program pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah Desa Kampung Baru memberikan kesempatan bagi semua masyarakat untuk memberikan usulan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Kampung Baru. Dengan demikian kegiatan yang diusulkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Kampung Baru terutama bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Masyarakat Desa Kampung Baru terlibat dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kampung Baru secara bersama-sama dengan masyarakat Desa Kampung Baru pada saat musyawarah desa perencanaan dilaksanakan.

Pengambilan keputusan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Kampung Baru melalui musyawarah Desa. Terdapat 4 musyawarah desa yaitu Musyawarah desa I membahas tentang tujuan, prinsip, dan pendekatan program, penjelasan struktur organisasi program, dan membentuk kepengurusan OMS, KPP, dan Kader Desa. Musyawarah desa II membahas tentang prioritas permasalahan yang terdapat didesa, prioritas kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan PJM Pronangkis, Ketersediaan lahan/hibah lahan, pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun, perumusan rencana kegiatan untuk penyusunan RKM. Musyawarah III membahas tentang penetapan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemilihan dan penetapan panitia pengadaan barang/jasa, dan penetapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Musyawarah desa IV membahas tentang hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pengolaan dana bantuan oleh OMS, Laporan pertanggung jawaban, mencakup : laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K), Realisasi kegiatan dan biaya (RKB) disertai dengan foto-foto pelaksanaan.

Banyak usulan masyarakat Desa Kampung Baru pada saat musyawarah Desa berlangsung, namun tidak semua usulan dari masyarakat dapat dilaksanakan. Usulan tersebut diantaranya yaitu sebagian kecil mengusulkan jalan aspal dan sebagaian besar mengusulkan jalan paving. Usulan jalan aspal di lontarkan oleh pak jalalludin alasannya di ditolak dengan alasannya menyambung jalan yang sudah ada dan terdapat lokasi pendidikan, sedangkan sebagian besar menolak usulan tersebut karena lebih baik jalan paving bisa menyambung dua dusun.

Partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari daftar kehadiran masyarakat Desa Kampung Baru pada saat Musyawarah Desa diadakan. Kehadiran masyarakat Desa Kampung Baru dalam musyawarah desa cukup baik, dilihat dari daftar hadir masyarakat dalam musyawarah desa dari undangan 75 yang hadir 41 orang. Sehingga bila yang datang lebih dari 50% artinya partisipasi masyarakat sudah cukup baik.

2. Participation in implementation

UNAPDI (1980:84) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sering kali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di pihak lain, lapisan yang diatasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara profesional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus dirtikan pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan beragam korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPIP terdapat tiga macam bentuk partisipasi masyarakat yang dapat diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun PPIP tidak memilih semua bentuk kegiatan tersebut. PPIP Pusat hanya memilih partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga. Pemilihan sumbangan tenaga supaya masyarakat juga mempunyai rasa memiliki terhadap program pembangunan yang dilaksanakan.

PPIP tidak memilih partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan material karena sumbangan dari masyarakat kualitas material atau bahan bangunan yang asal-asalan tidak melihat kualitas. Sedangkan PPIP menginginkan jenis material atau bahan bangunan yang kualitasnya bagus supaya hasil dari pembangunan jalan paving desa yang kuat, tidak mudah rusak.

Sumbangan dalam bentuk tenaga sangat diharapkan PPIP, tetapi sumbangan tenaga yang diberikan masyarakat Desa Kampung Baru pada saat pelaksanaan pembangunan jalan paving desa diberi imbalan berupa upah Hari Orang Kerja supaya meraka mendapatkan pendapatan dari kegiatan pembangunan jalan paving desa. Tujuan PPIP sendiri adalah juga megentas kemiskinan. Oleh karena itu dalam kegiatan pembangunan jalan paving desa memberi peluang kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) supaya dapat bekerja sebagai tenaga kerja pada pembangunan jalan paving desa. Upah Hari Orang Kerja (HOK) tidak boleh dipotong atau dimintai sebagai bentuk sumbangan masyarakat. Karena upah Hari Orang Kerja (HOK) ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Kampung Baru.

Upah Hari Ongkos Kerja (HOK) yang diberikan berdasarkan keahlian yang dimiliki, untuk tukang (tenaga ahli) upah yang didapat perhari sebesar Rp.42.500,00 sedangkan upah Harian Orang Kerja (HOK) kuli bangunan sebesar Rp.35.000,00. Hari kerja yang ditentukan yaitu hari senin sampai sabtu. Dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Dengan adanya kegiatan pembangunan jalan paving desa di Desa Kampung Baru sangat menguntungkan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), karena dalam pelaksanaan pembangunan jalan paving Desa Kampung Baru mampu memberikan penghasilan kepada masyarakat Desa Kampung Baru untuk mencukupi kebutuhan mereka.

PPIP menerima sumbangan dalam bentuk apapun, misalnya masyarakat ingin menyumbang dalam bentuk uang, dari PPIP sendiri tidak menetapkan berapa jumlah uang yang ingin mereka sumbangkan, namun PPIP lebih mengutamakan sumbangan berupa tenaga ataupun makanan, karena dilihat dari dana sendiri PPIP tidak akan kekuranngan dana karena sudah ada perinciannya. Sumbangan masyaraka sendiri di gunakan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja, dengan demikian masyarakat merasa bertanggung jawab dalam pembangunan jalan paving desa.

Sumbangan dalam bentuk makanan dan minuman juga dilakukan oleh masyarakat Desa Kampung Baru yang rumahnya berdekatan dengan lokasi pembangunan jalan paving desa. Lama-kelamaan meskipun tidak mendapat giliran masyarakat Desa Kampung Baru sukarela memberikan makanan, kue, dan minuman kepada para pekerja. Dengan demikian nilai gotong royong yang masih tinggi di masyarakat Desa Kampung Baru.

3. Partisipation in benefit

Menurut ndraha (1990) Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru dapat diwujudkan dalam partisipasi pemanfaatan hasil pembangunan jalan paving desa. Masyarakat Desa Kampung Baru merasakan

manfaat dari pembangunan jalan paving desa. Manfaat dari pembangunan jalan paving desa ini adalah untuk mempermudah akses masyarakat dalam kegiatan seharihari, memperlancar atau mempermudah dalam membawa hasil pertanian, meningkatkan perekonomian bagi masyarakat dan meningkatkan nilai harga tanah yang ada di sekitar proyek, oleh karena itu masyarakat wajib dan ikut menjaga dan memelihara apa yang telah di berikan pemerintah untuk kesejahteraan.

4. Partisipation in evaluation

Suwignjo (1985:110) partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan jalan paving Desa Kampung Baru dapat dikatakan berhasil jika sudah melalui tahap evaluasi, karena dengan adanya evaluasi dapat diketahui kekurangan dan permasalahan dari pembangunan jalan paving Desa Kampung Baru dan hal apa yang perlu diperbaiki. Tahap evaluasi ini dilakukan melalui rapat yang diadakan di Balai Desa Kampung Baru pada saat satu bulan selesainya kegiatan pembangunan jalan paving desa. Hasil rapat menyatakan bahwa pembangunan jalan sudah sesuai dengan prosedur, sasaran, dan tujuan pembangunan jalan paving desa. Walaupun pembangunan jalan desa tidak sesuai dengan waktu perencanaan, namun saat ini sudah selesai, hal ini di karenakan antrinya tender dari jombang yang tidak bisa mengirim secara tepat waktu ketika stok bahan paving habis. Namun hasil pembangunan jalan paving desa lebih bagus dari perencanaan awal karena perencanaan yang mengalami keterlambatan menjadi lebih disiapkan dan tidak tergesah-gesah dalam melaksanakan pembangunan, yaitu panjang pembangunan jalan paving desa sepanjang 853,40 meter dan lebar 3 Meter. Sehingga keberhasilan pembangunan jalan paving Desa Kampung Baru mencapai 100%.

Partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru dalam tahap evaluasi dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam rapat evaluasi pembangunan jalan paving Desa Kampung Baru yang diadakan di Balai Desa Kampung Baru. Keikutsertaan masyarakat Desa Kampung Baru dalam rapat evaluasi pembangunan cukup antusias. Hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat Desa Kampung Baru pada saat pelaksanaan rapat evaluasi dilaksanakan. Masyarakat Desa Kampung Baru ikut terlibat dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan bersama Tim PPIP. Partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru dalam tahap pemantauan dan evaluasi kegiatan juga dapat dilihat dari permasalahan yang muncul selama kegiatan pembangunan jalan desa paving dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara, masalah yang muncul dari pihak tender sehingga proses pembangunan jalan paving desa sedikit terhambat. Dalam tahap evaluasi Desa Kampung Baru dapat di katahui bahwa keterlibatan masyarakat juga mempunyai peran penting, di Desa Kampung Baru bila masyarakat mau membantu dalam berpartisipasi berupa tenaga.

Partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru dalam tahap evaluasi juga dapat diketahui melalui keterlibatan masyarakat dalam keikutsertaan musyawarah tahap akhir yaitu mudes IV. Dalam musyawarah tersebut masyarakat sangat antusias dengan keberhasilan pembangunan jalan paving karena di setiap kegiatan mereka ikut dan terlibat di dalamnya. Tanpa di minta sumbangan pun mereka juga dengan sukarela memberikan apa yang bisa bermanfaat untuk kelancaran pembangunan, mereka sadar bahwa program PPIP yang di berikan oleh pemerintah adalah untuk kepentingan dari masyarakat sendiri.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat desa Kampung Baru ketika ada program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, hasil yang di peroleh adalah masyarakat sangat antusias dalam keikutsertaan membangun jalan paving. Dalam setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan masyarakat selalu terlibat di dalamnya.

Participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa pada tahap perencanaan, bahkan masyarakat yang hadir cukup banyak khususnya laki-laki hal ini bisa di kategorikan cukup baik dalam tahap perencanaan.

Participation in implementation partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berwujud kontribusi. Dalam pelaksanaannya tingkat kesadaran dari masyarakat sendiri yang telah ikut bergotong-royong memberikan sumbangan tenaganya demi kelancaran dan keberhasilan program tersebut.

Partisipation in benefit atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat. Dapat dilihat bahwa program yang di berikan oleh pemerintah melalui PPIP ini sangat banyak memberikan manfaat bagi warga Desa Kampung Baru, di antaranya adalah dapat memperlancar akses jalan warga desa untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dapat juga meningkatkan perekonomian bagi warga miskin yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan program tersebut karena di beri upah harian. Selain itu dapat meningkatkan rasa tolong menolong dan kerja sama bagi warga.

Partisipation in evaluation atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Setelah semua pelaksanaan terlaksana PPIP memberikan kesempatan kepada warga untuk menilai dan mengawasi bagaimana jalannya program, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak sesuai maka, masyarakat di perbolehkan untuk memberikan masukan kepada team agar dapat kiranya memperbaiki apa yang perlu di perbaiki pada program selanjutnya.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam propram PPIP di

- Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, peneliti ingin menyampaikan saran yang pertama untuk Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, yang ingin saya sampaikan adalah :
- Untuk efektivitas dan efisien pengadaan, maka diharapkan rencana kebutuhan bahan dapat lebih rinci untuk menghindari masalah-masalah dilapangan.
- Agar program juga terlaksana dan terkoordinir dengan baik , maka sebagai tim pelaksana harus membina hubungan yang baik dengan masyarakat agar nantinya, masyarakat mendukung sepenuhnya dalam kelancaran pembangunan jalan paving.

Saran untuk masyarakat:

3. Lebih meningkatkan rasa kepedulian dan partisipasi serta gotong royong apabila ada program dari pemerintah, hal ini juga untuk kesejahteraan masyarakat, jadi dukungan dari masyarakat sangat di butuhkan dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws, et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat.

 Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Adisasmita, Raharjdo.(2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Makasar:Graha Ilmu Arikunto.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arimbi.(1993). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, WALHI, Jakarta.
- Bryant, Caroline. & Louise G White. 1982. *Managing Development inThirtd World*. Colorado: Westview Press, Boulder.
- Dinas PU Cipta Karya 2014, "Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur".
- Grigg, Neil, 1988. Infrastructure Engineering and Management. John Wiley and Sons.
- Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel, 2000.Infrastructure
 System Management and
 Optimization.Internasional Seminar
 "Paradigm and Strategy of Infrastructure
 Management" Civil Engeenering
 Departement Dipononegoro University.
- H.A.R Tilaar (2009). Kekuasaan dan Pendidikan:

 Manajemen Pendidikan Nasionaldalam
 Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huraerah, Abu.(2008). Pengorganiasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
- Iskandar, Huraerah. 2004. *Teori dan Isu Pembangunan*. Bandung: Puspaga

- Kodoatie, Robert J.(2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Korten, D.C.(1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mikkelsen, Britha.(2001). *Metode Penelitian Partispatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, Matte,B,S,Huberman,A, Michael.(2009). *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber MetodeMetode Baru. Terjemahan Tjejep Rohendi
 Rohidi. Cetakan I Jakarta: UI Press
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1993, *Politik Pembangunan:* Sebuah Konsep, Arah dan Strategi, Tiara wacana, Bandung.
- Mubyarto.(1997). Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.Jakarta: Aditya Media.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka
- Nasution, Zulkarnain (2009). Solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat desa transisi. Malang: UMM Press
- Nawawi, Hadari.(1995) *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu (1990). *Pembangunan Masyarakat*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Sastropoetro, RA. Santoso, 1988, Partisipasi, komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan, Penerbit Alumni, Bandung.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret. University Press. Surakarta.
- Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003, Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan sampai Pemeberdayaan, Yogyakarta: Aditya Media.
- Surakhmad, Winarno. (1978). Dasar Research Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung: C.V. TARSITO
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*, Jakarta: UM Press.
- Sunarti, 2003, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok Jurnal Tata Loka, Semarang: Planologi UNDIP.
- Suwignjo, 1985. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa. Yogyakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P.(2000). *Pembangunan Ekonomi* Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- UNAPDI. (1980). Local Level Planning and Rural
 Development. New Delhi: Consept
 Publishing Company